

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Proses demokratisasi menjadi ciri penting dalam perkembangan politik di berbagai dunia pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Gerakan perlawanan terhadap rezim otoriter menjadi titik sentral sebuah proses demokratisasi di suatu negara. Gerakan perlawanan yang terus bergerak ekstra institusional tersebut secara perlahan merongrong kekuasaan rezim yang berkuasa. Dalam konteks Indonesia, gerakan-gerakan perlawanan terus mendapatkan panggungnya ditengah keterbukaan politik yang semakin tak terbendung untuk menyuarakan kehidupan yang lebih demokratis.

Munculnya gerakan ekstra-parlementer merupakan jawaban atas lemahnya fungsi legislatif sistem politik oleh kekuatan politik formal. Mahasiswa, dan intelektual muda dari berbagai ideologi dan prespektif berada pada inti dari gerakan ekstra-parlementer ini. Mahasiswa sebagai golongan kekuatan politik moril menunjukan diri dalam protes dan demonstrasi, kemudian Mahasiswa menjadi sebuah kekuatan ekstra-parlementer untuk menjawab kepincangan dan langkah-langkah pemerintah (Sulistyowati, 2014, hlm.3). Gerakan ini kemudian mengingatkan kita pada gerakan sosial di bagian dunia lain, saat itu Mahasiswa bercampur dengan aneka kekuatan *civil society* lainnya seperti para pekerja, buruh dan tani. Kekuatan sipil tersebut menuntut perubahan sistem yang kemudian berubah menjadi gelombang sejarah berupa runtuhnya sistem ekonomi politik yang tidak demokratis dan tidak pro-ekonomi pasar (Denny J.A, 2006, hlm. 21).

Gerakan ekstra-parlementer memang lahir atas dasar luapan kekesalan terhadap kepincangan dan langkah kebijakan pemerintah. Namun, jauh sebelum itu harus dipahami bahwa gerakan ekstra-parlementer lahir dari pergolakan politik kampus yang sangat dinamis dan teramat panjang. Dimulai dari diberlakukannya kebijakan NKK/BKK oleh Daud Joesoef seorang Menteri Pendidikan periode 1978-1983 yang secara tegas merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mematikan gerak politik mahasiswa di dalam kampus.

Kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) yang ditujukan untuk membungkam gerak politik dari mahasiswa, nampaknya untuk beberapa saat bisa dikatakan berhasil, terbukti dengan tidak adanya aktifitas politik baik protes maupun demonstrasi yang mengkritik gerak langkah pemerintah setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Konsekuensi lain dari kebijakan NKK/BKK adalah dihapuskannya Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa yang merupakan organ kampus yang menjadi sarana mahasiswa berpolitik. Aktivitas mahasiswa di bawah pengawasan birokrasi kampus dan ABRI, dan Unit Kegiatan Mahasiswa hanya terbatas pada acara olahraga dan sosial, berikut menurut Boudreau (2004,) :

The NKK/BKK imposed more stringent course requirements, placed student life under a campus bureaucracy with ABRI oversight, barred student organizations from political activities and abolished institutions central to the 1978 demonstrations (especially the student councils and press). Unit Kegiatan Mahasiswa were limited of sporting and social event, and could only exist on the individual faculty level. (hlm. 117)

Politik bagi mahasiswa saat itu hanya sebatas ilmu, praktik politik sangat dilarang keras. Pemerintah melalui birokrasi kampus tidak segan untuk memberhentikan mahasiswa yang kedapatan melakukan praktik politik, namun justru ini menjadi sebuah paradoks. Hal tersebut diungkapkan oleh Boudreau dalam karyanya (2004, hlm. 118) *“In the main, however, activist complied with the new proscriptions and established study groups to review their pasts. This relative meekness is puzzling, particularly given recent student concern about organization power”*. Di sisi lain dengan dihapuskannya organ politik mahasiswa di kampus seperti Dewan Mahasiswa justru membuat mahasiswa membentuk forum-forum diskusi dan studi sebagai bentuk pelarian dari aktivitas politik kampus. Dengan membentuk forum-forum diskusi tersebut nampaknya lebih diamini oleh pemerintah yang menginginkan mahasiswa menjadi manusia penganalisis bukan menjadi manusia rapat umum (Sulistyowati, 2014, hlm.7).

Dari forum-forum diskusi dan studi tersebut kemudian berkembang pengetahuan teoritis mengenai kajian pemikiran revolusioner, teori ketergantungan, analisis kelas, dan kritik terhadap kapitalisme namun dalam bentuk yang lebih kontemporer. Kebetulan, aktivitas diskusi sedang marak sekali di kalangan aktivis

mahasiswa di berbagai kota, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta (Gunawan, 1999, hlm.36).

Kajian terhadap kajian pemikiran revolusioner seperti Marxisme pun berkembang, hal ini senada dengan yang diungkapkan Yuniarto (2016, hlm. 37) bahwa secara diam-diam beberapa aktivis mahasiswa kembali mempelajari ajaran yang berbau Marxis yang sempat dilarang masa itu. Dari kegiatan tersebut kemudian memunculkan aktivis mahasiswa yang cukup militan dan radikal.

Fokus mahasiswa bukan hanya pada antar sesamanya, namun mereka juga merasa bahwa aktivitas mahasiswa haruslah dekat dengan lapisan masyarakat lainnya dari berbagai sektor sosial. Senada dengan yang diungkapkan Boudreau (2004) bahwa :

Some conjecture that most student grew disinterested in campus politics, and study groups, eventually did argue that activists should seek closer ties with Indonesian society off-campus, to that end, established small Non-Governance Organization. (hlm. 118)

Aktivitas mahasiswa kemudian sampai pada tahap organisasional, dimana kelompok-kelompok diskusi mahasiswa mulai bersentuhan dengan sektor sosial masyarakat.

Hal ini dimulai dengan membentuk jaringan bawah tanah yang strateginya adalah mengadvokasi masyarakat dengan mendirikan kelompok-kelompok ad-hoc, yaitu dalam komite-komite pengorganisasian rakyat. Komite-komite ini lebih diarahkan untuk menghimpun sejumlah mahasiswa sebagai kader pergerakan yang akan diterjunkan di tengah komunitas petani pedesaan atau komunitas buruh. (Gunawan, 1999, hlm. 42). Dengan begitu aktivitas mahasiswa memang menyentuh langsung sektor sosial di masyarakat dan dengan mudah mahasiswa dapat melakukan mobilisasi masa terlebih dengan membangun jaringan relasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Aktivitas tersebut juga tidaklah menghidupkan aktivitas politik mahasiswa. Pada titik ini beberapa mahasiswa memandang bahwa perlu adanya organisasi pusat bagi pergerakan mahasiswa, seperti halnya Dewan Mahasiswa yang dilarang oleh pemerintah. Kemudian diadakanlah *workshop* pers mahasiswa yang dimotori oleh *Asian Student Association (ASA)*, sebuah organisasi regional Asia yang

menghimpun gerakan mahasiswa Asia. Mereka merencanakan untuk meledakkan gerakan-gerakan pro-demokrasi yang dipelopori mahasiswa-mahasiswa Asia (Sudjatmiko, 2013, hlm.282).

Sebagai organisasi yang menghimpun mahasiswa di berbagai negeri Asia, ASA tentunya sudah membentuk jaringannya di Indonesia. Hal ini juga diungkapkan Gunawan (1999, hlm.59) bahwa “Kebetulan pada waktu itu, kelompok mahasiswa di UGM dan UII yang tergabung dalam FKMY, sudah merintis hubungan dengan *Asian Student Association (ASA)* yang merupakan perhimpunan berbagai organisasi pergerakan mahasiswa se-Asia”. Melalui hubungan tersebut memungkinkan mahasiswa Indonesia melakukan studi banding serta kajian mengenai perkembangan serta kondisi pergerakan mahasiswa pro-demokrasi.

Workshop pers yang diselenggarakan oleh ASA tadi kemudian berujung pada lahirnya organisasi mahasiswa Indonesia bernama *Student Solidarty for Democracy in Indonesia (SSDI)* (Sulistiyowati, 2014, hlm.8). Pada perkembangan selanjutnya *Student Solidarity for Democracy in Indonesia* atau disingkat SSDI terus melakukan penyesuaian, di antaranya adalah dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan Organisasi. Pada tahun 1993 diputuskan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) sebagai nama lain dari SSDI (Sulistiyowati, 2014, hlm.8). SMID yang dari awal berdiri telah menasbihkan diri untuk fokus dalam isu-isu mengenai HAM dan Demokrasi bergabung bersama organisasi kerakyatan dari berbagai sektoral, seperti Serikat Tani Indonesia, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat dan Serikat Rakyat Indonesia untuk mendeklarasikan terbentuknya sebuah partai dengan nama Partai Rakyat Demokratik (PRD).

PRD di deklarasikan sebagai organisasi politik yang mewadahi berbagai organisasi mahasiswa, buruh dan petani. Deklarasi PRD juga sekaligus menunjuk Sugeng Bahagio seorang Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM mengisi posisi ketua umum. Namun, PRD di bawah kepemimpinan Sugeng Bahagijo mengundang ketidakpuasan dari anggota PRD lainnya, karena ternyata kepemimpinan Sugeng memiliki kecenderungan sama seperti elite politis lain, yaitu menyampaikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru melalui retorik verbal media

masa, bukan dengan aksi massa rakyat yang tersadarkan (Argenti, 2016, hlm. 123). Kritik yang disampaikan melalui pernyataan-pernyataan yang dimuat di media masa dianggap tidak mampu mendorong potensi perlawanan massa rakyat dan juga gagal membentuk aliansi anti kediktatoran.

Pembentukan PRD saat itu dimaksudkan sebagai wadah dialog antara mahasiswa, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi dari berbagai sektoral, namun setelah terjadi perpecahan dalam tubuh PRD pada tahun 1995 yang memicu dibentuknya Komite Penyelamat Organisasi Persatuan Rakyat Demokratik (KPO-PRD) yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko (Sulistyowati, 2014b). KPO-PRD bertujuan untuk memperbaiki sistem kepengurusan agar program-program dapat terlaksana dengan baik (Ascha, 2013). Atas dasar itu maka KPO-PRD menyelenggarakan kongres penyusunan kepengurusan baru, dan juga hasil dari diadakannya kongres tersebut adalah mengubah bentuk organisasi yang pada awalnya merupakan wadah dialog antar sektoral menjadi partai politik.

PRD yang lahir dari koalisi antar organisasi multi sektoral kemudian menjadi sebuah payung organisasi yang mewadahi berbagai organisasi tersebut. Sebagai payung dari organisasi multisektoral, PRD mengkoordinasi mobilisasi masa dan aksi demonstrasi. *“The resulting multi-sectoral mobilization attracted allies committed to a broad national reform - something alien to most groups except students and LSM workers”* (Boudreau, 2004, hlm. 222), tujuan dari pengorganisasian masa tersebut ialah reformasi nasional.

Pada bulan Mei, 1996, diadakan Kongres I Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Sleman, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh ratusan delegasi yang mewakili berbagai ormas sektoral, serta peninjau (observer) dari CNRM dan dari Democratic Social Party (DSP, Partai Sosial Demokrat) Australia (Ascha, 2013). Pada kongres ini juga dibuat Manifesto Politik PRD yang kemudian dibacakan di Kantor YLBHI saat acara deklarasi PRD, 22 Juli 1996.

PRD sendiri mengklaim bahwa Kongres ini merupakan puncak dari proses penyatuan gerakan rakyat di masa kediktatoran Orde Baru. Klaim ini didasarkan pada keikutsertaan ratusan delegasi dari organisasi masyarakat lintas sektoral yang sebelumnya telah terafiliasi di bawah payung perjuangan Persatuan Rakyat Demokratik, seperti SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia

untuk Demokrasi), PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), STN (Serikat Tani Nasional), JAKKER (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat).

PRD sebagai partai politik yang memiliki basis masa dari berbagai sektor, termasuk Buruh, Tani, dan kaum Intelektual menjadi oposisi bagi pemerintahan lewat aksi boikot pemilu hingga penolakan program energi nuklir dan penolakan penjualan alkohol menjadi salah satu agenda penting Partai Rakyat Demokratik. Namun program utama saat itu adalah pembukaan ruang demokrasi dengan mencabut dua tiang utama keditaktoran Soeharto, yakni 5 UU Politik 1985 dan Dwifungsi ABRI. (PRD, 2010). Aksi protes yang dilancarkan oleh PRD dan juga organ sayap mahasiswa seperti SMID kemudian dianggap sebagai tindakan yang mengancam stabilitas politik pemerintah pada saat itu, tak heran maka beberapa di antara mereka yang terlibat menjadi tahanan politik Orde Baru, senada dengan Eklof (1999, hlm.169) *“In particular, members of the PRD and its student organisation SMID, became victims of the abductions and torture, but there were also other student activists”*. Di antara mereka yang terlibat dalam aksi protes kemudian menjadi target operasi pemerintah dan menjadi korban penculikan pemerintah Orde Baru.

Pasca peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta, partai berbasis anak-anak muda ini resmi dilarang pemerintah, pelarangan dikeluarkan setelah PRD dituduh sebagai dalang dibalik kerusuhan yang terjadi di Jakarta selama beberapa hari (Argenti, 2016, hlm. 123). PRD sebagai organisasi politik yang radikal, seperti yang diungkapkan Miftahuddin (dalam Cahyo,2016) bahwa :

Sikap politik PRD yang terbilang radikal karena selalu mengharapkan dan mendorong terjadinya perubahan total dan sistemik pada Negara Indonesia yang dianggapnya sudah sangat menyimpang dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam dokumen resmi UUD 1945 dan falsafah Pancasila. (hlm. 9)

Sikap politik yang radikal memang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah secara langsung menempatkan PRD sebagai “musuh” resmi pemerintah setelah terjadi peristiwa kerusuhan di kantor DPP PDI.

Pemerintah Orde Baru juga memburu para pimpinan dan anggotanya. Di antaranya adalah Budiman Sudjatmiko, Wilson, Ndaru, Nezar Patria, dan Petrus Hariyanto. Kader PRD yang tidak ditangkap pada saat itu kemudian menjalankan

taktik *clandestine* bawah tanahnya dengan terus mengkonsolidasikan gerakan perlawanan rakyat menuntut demokratisasi.

Berita pengunduran diri Soeharto hari Kamis 21 Mei 1998, segera menjadi berita dunia (Denny, J.A, 2006, hlm. 33). Berita pengunduran dari Presiden Suharto tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dengan serangkaian protes yang dilancarkan dari mahasiswa, intelektual dan organisasi sektoral masyarakat. Mundurnya Soeharto dari kursi Presiden juga membuka angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia. Setelah keruntuhan Orde Baru, PRD kembali menjadi partai politik yang bergerak secara legal, serta sempat menjadi peserta Pemilu 1999 (Argenti, 2016, hlm. 123). Partai Rakyat Demokratik kemudian dideklarasikan kembali pada bulan Maret 1999 setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Departemen Kehakiman Nomor 129/A-PP-PARPOL/II/1999 tertanggal 24 Februari 1999 yang mengakui PRD sebagai partai politik.

Setahun setelah kejatuhan Orde Baru, pemerintah kemudian menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Legislatif. Pemilu yang digelar pada tahun 1999 ini dilangsungkan secara bebas. Uniknya, Partai Rakyat Demokratik yang menyatakan bahwa mereka merupakan partai yang diarahkan untuk melancarkan aksi-aksi massa ekstra parlementer (PRD, 2010) ikut serta dalam pemilu yang diselenggarakan setelah jatuhnya Orde Baru. PRD bersama 47 parpol lainnya berhasil lolos verifikasi dan terdaftar sebagai peserta Pemilu yang diselenggarakan pada 7 Juni 1999, dengan nomor urut 16 (Miftahuddin dalam Cahyo, 2016, hlm 79).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menjadikan partai ini sebagai objek kajian. Terdapat beberapa alasan yang mendasari penulis menjadikannya sebagai objek penelitian. Pertama, dalam iklim politik pada masa rezim Orde Baru yang represif dan otoriter, tidak ada kebebasan untuk mendirikan organisasi massa maupun partai politik. Lahirnya PRD ditengah-tengah iklim seperti itu menimbulkan pertanyaan dan ketertarikan dalam diri penulis. Bagaimana bisa sekelompok orang membentuk organisasi dan mendeklarasikan diri sebagai partai politik ditengah aturan mengenai jumlah partai politik yang berlaku.

Kedua, program-program politik PRD selalu berkonfrontasi langsung terhadap pemerintahan Orde Baru, dan komitmen PRD sedari awal adalah untuk

meluaskan sentimen terhadap rezim Orde Baru. Bahkan, setelah pemerintah mengumumkan bahwa PRD yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan 27 Juli 1996 dan menetapkan para pimpinan PRD sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka, partai ini bergerak secara bawah tanah untuk tetap meluaskan sentimen terhadap Orde Baru. Periode ini juga menarik untuk dikaji, mengingat tidak adanya pemimpin partai tidak mempengaruhi gerakan PRD di lapangan. Bagaimana aktivis PRD menjalankan roda organisasi tanpa pimpinan partai hingga pada akhirnya masyarakat ikut melakukan aksi konfrontasi terhadap rezim Orde Baru.

Ketiga, dalam alam demokrasi modern tentunya Pemilihan Umum adalah salah satu sarana bagi partai politik untuk mencapai kekuasaan politik. Partai Rakyat Demokratik yang identik dengan aksi-aksi massa, demonstrasi dan gerakan ekstraparlemter kemudian ikut terjun dalam hingar bingar pesta demokrasi tersebut. Meskipun tidak mendapatkan perolehan suara diatas ambang batas *electoral threshold*, namun kehadiran PRD dalam konstelasi Pemilu 1999 cukup mendapat perhatian dari para pengamat politik dan masyarakat umum. Menjadi sangat menarik untuk dikaji apa motif terjunnya PRD dalam Pemilu dan bagaimana strategi kampanye atau kemenangan PRD dalam Pemilihan Umum 1999.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perkembangan Partai Rakyat Demokratik menuju Pemilu tahun 1999”. Sedangkan untuk memudahkan penulis dalam menjawab permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kelahiran Partai Rakyat Demokratik?
2. Bagaimana program politik dan strategi Partai Rakyat Demokratik dalam membangun sentimen terhadap Orde Baru?
3. Bagaimana strategi kemenangan Partai Rakyat Demokratik dalam Pemilu 1999?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis latar belakang kelahiran Partai Rakyat Demokratik yang ditinjau secara historis dan teoritis.
2. Menjelaskan program politik dan strategi Partai Rakyat Demokratik dalam membangun sentimen terhadap Orde Baru.
3. Menganalisis strategi kampanye yang digunakan Partai Rakyat Demokratik dalam pemilu tahun 1999.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah sosial dan politik dalam negeri pada masa Orde Baru dan Reformasi. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan fenomena terkait dengan kelahiran gerakan sosial politik seperti Partai Rakyat Demokratik dengan menggunakan pendekatan *political opportunity structure*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi masyarakat untuk berpikir dan bersikap terbuka terhadap muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok politik tertentu dalam konteks mendewasakan kehidupan demokrasi di Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan didalam rencana penulisan skripsi ini disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016 sebagai satu-satunya rujukan dalam menulis karya ilmiah, adapun sistematika penulisan karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memaparkan bagaimana latar belakang yang diungkapkan peneliti mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Selain itu, dalam bab ini terdapat rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini memaparkan kajian pustaka mengenai landasan teoritis yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diambil dari berbagai literatur yang menjadi acuan dalam penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memaparkan mengenai metode penelitian dan teknik penelitian yang akan peneliti gunakan sebagai langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian historis dan studi literatur.

Bab IV Dinamika Partai Rakyat Demokratik 1996-1999, pada bab ini memaparkan hasil dari penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian yang diambil oleh peneliti.

Bab V Simpulan, dan Saran, pada bab ini memaparkan kesimpulan peneliti terhadap hasil penelitian yang diangkat oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti memaparkan implikasi penelitian yang telah dilakukan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.